

 Dashboard

 Mahasiswa Bimbingan

 Rencana Studi

 Kurikulum

 Mata Kuliah

 Jadwal Kuliah

 Mahasiswa

 RO Registration Online

 Mata Kuliah yang Diajar

 Verifikasi Point Kegiatan Mhs.

 Profil Dosen

 Laporan

 Dosen

 Logout

Input Nilai

Tahun Akademik / Semester

Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap

Program Studi

731 - Ilmu Politik - S1

Mata Kuliah

Politik luar Negeri Indonesia (731241025)

Jumlah SKS

3 SKS

Kelas

A

Jadwal

Rabu, 10:00 - 12:30 | Ruang Kuliah

Jumlah Mahasiswa

6 Mahasiswa

 Kembali

Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka. Prodi/BAA untuk persetujuan.

Nilai Mahasiswa

Komponen Penilaian

 Simpan

 Export to Excel

Validasi Komponen Nilai

NO	NIM	Nama Mahasiswa	Tugas	UTS	UAS	Nilai	Verifikasi Ka.Prodi
1	2073150003	ERVI SELTA BR KETAREN	77	80	82	A (80.4)	<input type="checkbox"/>
2	2073150004	VAINELS KRISNA LENTA LAWOLO	89	80	90	A (86.8)	<input type="checkbox"/>
3	2073150005	DAVIDSON PATRIKS BARISEN BRABAR	89	87	90	A (88.9)	<input type="checkbox"/>
4	2073150006	LIVIO ZEFANYA LANTU	50	50	50	C (50)	<input type="checkbox"/>
5	2073150007	NATHASYA MARNALA	55	65	70	B (65.5)	<input type="checkbox"/>
6	2073150008	YANUARIUS MERE	50	50	50	C (50)	<input type="checkbox"/>

 Dashboard

 Mahasiswa Bimbingan

 Rencana Studi

 Kurikulum

 Mata Kuliah

 Jadwal Kuliah

 Mahasiswa

 RO Registration Online

 Mata Kuliah yang Diajar

 Verifikasi Point Kegiatan Mhs.

 Profil Dosen

 Laporan

 Dosen

 Logout

Daftar Hadir

Tahun Akademik / Semester

Program Studi

Mata Kuliah

Jumlah SKS

Kelas

Jadwal

Jumlah Mahasiswa

Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap

731 - Ilmu Politik - S1

Politik luar Negeri Indonesia (731241025)

3 SKS

A

Rabu, 10:00 - 12:30 | Ruang Kuliah

6 Mahasiswa

[← Kembali](#)
[+ Buat Daftar Kehadiran](#)
[☰ Rekap Kehadiran Mahasiswa](#)

Pertemuan #1: 03-Mar-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #2: 10-Mar-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #3: 17-Mar-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #4: 24-Mar-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #5: 31-Mar-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #6: 07-Apr-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #7: 14-Apr-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #8: 21-Apr-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #9: 28-Apr-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #10: 05-May-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #11: 12-May-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #12: 19-May-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #13: 26-May-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼
Pertemuan #14: 03-Jun-2021 10:00 - 12:30	(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Indah Novitasari, S.Sos., M.Si	▼

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and right sides of the slide, framing the central text.

POLITIK LUAR NEGERI

PERTEMUAN II (DEFINISI, TUJUAN DAN STRATEGI)

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Politik Luar Negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya di dasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional.

POLITIK LUAR NEGERI

- Interaksi dalam sistem internasional mengatakan bahwa hubungan internasional pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi antar aktor atau kesatuan sosial tertentu, termasuk segala sesuatu di seputar interaksi tersebut.
- Interaksi yang dimaksud adalah yang berlangsung dalam sistem internasional dimana negara merupakan aktor utama yang melakukan transaksi yang terbentuk oleh adanya tuntutan serta tanggapan yang terjadi sewaktu interaksi berlangsung.
- ***Tuntutan dan tanggapan tersebut bermula dari kepentingan nasional suatu negara dan politik luar negeri merupakan alat untuk mencapainya dalam hubungan internasional.*** diantara kebijakan (policy) dan taktik (tactics).

POLITIK LUAR NEGERI

• Dalam pandangan Rizal Sukma, Politik Luar Negeri seharusnya menjadi acuan bagi kebijakan pertahanan maupun hubungan ekonomi luar negeri. Polugri juga harus menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat, yang tidak dibagi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan maupun pelaksanaannya.

Rizal Sukma, pada seminar "Telaah Kritis Mengenai Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri", Deplu, 13 Juli 2006.

POLITIK LUAR NEGERI

- Politik Luar Negeri (*foreign politics*) cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda suatu Negara dengan Negara lain. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah Negara tentang cara pandang Negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional, oleh karena itu politik cenderung bersifat tetap.

POLITIK LUAR NEGERI

- Politik Luar Negeri harus bisa dibedakan dengan kebijakan luar negeri (*foreign policy*), yaitu strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya dan keinginan pemerintahan terpilih. Kebijakan luar negeri dengan demikian akan bergantung pada politik luar negeri.
- Perumusan pelaksanaan politik luar negeri dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik internasional pada khususnya dan situasi hubungan internasional pada umumnya.

PENGERTIAN POLUGRI

- *Hal ini sejalan dengan pemikiran Cecil V. Crabb Jr, yang mengatakan : “Jika dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu: **tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya.** Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi. Dalam unsur-unsurnya itu terdapat politik luar negeri suatu negara, besar atau kecil semuanya sama.*

Jenis-jenis Polugri

- **Polugri Jangka Pendek.** Dengan jangka waktu lima tahun ke bawah, yaitu kebijaksanaan untuk menghadapi atau mengantisipasi persoalan tertentu yang bersifat insidental. Misalnya, kebijaksanaan luar negeri RI untuk menghadapi masalah-masalah Mobil Timor, Peristiwa 27 Juli, Pemboman di Bali dan JW. Marriott.
- **Polugri Jangka Menengah.** Biasanya punya sasaran atau di aplikasikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat internasional baik pada lingkungan regional maupun global yang di pengaruhi oleh kecenderungan tertentu (isu ekonomi, dan lain-lain). Bisa di kaitkan dengan pembabakan pembangunan nasional (Pelita). Polugri jangka menengah, jangka waktunya lima tahun ke atas, dan biasanya di cantumkan dalam GBHN.
- **Polugri Jangka Panjang.** Polugri dengan orientasi yang mengacu atau di landaskan pada konstitusi, ideologi atau orientasi bangsa yang di pegang selama ini. Sebagai dasar secara umum dari polugri yang di laksanakan

POLITIK LUAR NEGERI

- Dalam pandangan Couloumbis dan Wolfe, politik luar negeri bisa dibagi atas dasar tiga kategori, sebagai contoh, kita bisa membedakannya menurut keputusan-keputusan yang kritis, penting dan rutin.
- Kita juga bisa membedakan keputusan-keputusan tadi menurut kategori isu, seperti: isu-isu militer, politik, ekonomi, lingkungan, sumber-sumber energi, teknik, kultural dan humaniter (kemanusiaan). Keputusan-keputusan juga bisa dibagi-bagi melalui kriteria geografis, seperti hubungan Timur-Barat, Utara-Selatan, Selatan-Selatan.
- Selain itu, beberapa keputusan melibatkan -sampai taraf yang lebih rendah atau lebih tinggi- kelompok-kelompok kepentingan domestik, dan harus di buat hirau terhadap dampak politik domestik bagi para *decision maker*

Tujuan Politik Luar Negeri

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia.

Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spirituil.

Menciptakan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Landasan Hukum Politik Luar Negeri

Pancasila

Keputusan Presiden

Nomor 108 Tahun 2003
tentang Organisasi
Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri

**Pembukaan UUD
1945**

Alinea I dan Alinea IV

**Undang-Undang Dasar
Negara RI 1945**

Pasal 11 ayat 1
Pasal 13

Undang-Undang

UU No. 37 Tahun 1999
UU No. 24 Tahun 2000

Ketetapan MPR

- TAP MPRS No.
XII/MPRS/1966
- TAP MPR No.
IV/MPR/1973

KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI

- Keputusan yang bersifat pragmatis (terencana), adalah keputusan besar yang mempunyai konsekuensi jangka panjang, membuat studi lanjutan, pertimbangan dan evaluasi yang mendalam mengenai seluruh opsi alternatif;
- Keputusan yang bersifat krisis adalah keputusan yang dibuat selama masa-masa terancam, waktu untuk menanggapi terbatas, dan ada elemen-elemen yang mengejutkan yang membutuhkan respon yang telah direncanakan sebelumnya;
- Keputusan yang bersifat taktis adalah keputusan penting, biasanya bersifat pragmatis, memerlukan revaluasi, revisi dan pembalikan

Negara, Polugri dan Diplomasi

- Hubungan antar negara, politik luar negeri dan diplomasi merupakan tiga kegiatan yang saling berkaitan dalam usaha setiap warga untuk menjamin kepentingan-kepentingannya dan untuk mencapai tujuannya.
- Pemerintah menentukan urutan prioritas kepentingan yang hendak dipertahankan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun cara pendekatan dan pelaksanaannya dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan luar negeri.

- karena keadaan internasional tidak statis, tetapi selalu berkembang, maka kebijaksanaan luar negeri selalu memerlukan penyesuaian dengan perkembangan tersebut, bahkan harus dapat mengantisipasi sejauh mungkin perkembangan selanjutnya.
- *Namun dalam menyesuaikan kebijaksanaan luar negeri dengan situasi internasional yang berkembang, landasan dan dasar-dasar dari politik luar negeri tetap sama dan tidak berubah, karena dasar-dasar yang pokok dapat dikembalikan pada Undang-undang Dasar 1945.*

- *Dasar-dasar yang pokok dari Politik Luar Negeri RI tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Alinea pertama menyatakan bahwa :
...kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan...*

- *Selanjutnya Pembukaan UUD'45 mengatakan dalam ayat ke-4, bahwa : ...Pemerintah/negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.*

OVERVIEW

- Politik Luar Negeri Indonesia dengan demikian mempunyai landasan atau dasar yang kuat karena berakar dalam falsafah Pancasila.
- Karena itu bagaimanapun juga kita tidak bisa menyimpang daripadanya dan harus tetap setia pada dasar-dasar atau landasan pokok politik luar negeri yang oleh perintis kemerdekaan dituangkan dalam kata yang sederhana dan jelas, dan bisa dikatakan sebagai *landasan ideal* dari politik luar negeri Indonesia.

- *Dalam melaksanakan aspek ideal tersebut bisa saja tidak parallel dengan aspek realitas, disinilah diperlukan manuver dan kelincahan berdiplomasi yang luwes, yang dalam pelaksanaannya tidak dogmatis dan kaku, tetapi realistis dan pragmatis melalui pelaksanaan Politik Luar Negeri yang bebas aktif.*

Politik Luar Negeri : Bebas Aktif

- Bebas : *dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.*
- Aktif : *berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif.*

- Dengan polugri yang bebas aktif, Indonesia mendudukan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai objek, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan nasionalnya.
- Politik luar negeri adalah komponen dari kebijaksanaan politik nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi riil di dalam negeri.

Prioritas Pemikiran Strategis Indonesia

- Pelaksanaan polugri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang (sekarang *recovery*).
- Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya lingkungan ASEAN sebagai *corner stones* dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional.
- Meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa.
- Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi .
- Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan social.